



SERAH TERIMA LHP KINERJA SEMESTER II TAHUN 2021

Kepala Perwakilan, Hery Ridwan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Sulawesi Barat kepada Gubernur dan Bupati dalam lingkup Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Barat secara daring. Bertempat di kantor sementara BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat-Gowa, (23/12).

**KALAN DAN DIRJEN CIPTA KARYA PUPR TINJAU
PROSES REHABILITASI GEDUNG KANTOR BPK SULBAR**



**PEMBAHASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2021**



**BPK SULBAR JALIN KOMUNIKASI AKTIF
DENGAN STAKEHOLDER & MITRA KERJA**



**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CALON APARATUR
SIPII NEGARA (CASN) BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**



**PENYERAHAN LHP PILKADA SERENTAK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN
SOSIAL MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA**



BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat serta LHP-DTT atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa secara virtual pada Kamis, 23 Desember 2021

SEMARAK PEMBUKAAN RANGKAIAN HUT BPK RI KE- 75



Gowa, (26/10) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyelenggarakan kegiatan Pembukaan Rangkaian Kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 BPK RI di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung secara fisik terbatas.....lanjut hal. 2

" Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) dan atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah daerah "



SERAH TERIMA LHP KINERJA SEMESTER II lanjut hal.1

Gowa, (23/12) – Bertempat di kantor sementara BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan, Hery Ridwan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Sulawesi Barat kepada Gubernur dan Bupati dalam lingkup Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Barat secara daring, yang meliputi:

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta Instansi terkait lainnya;
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju serta Instansi terkait lainnya;
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta Instansi terkait lainnya;
Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi terkait lainnya;
Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah; dan
Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Hery Ridwan mengingatkan bahwa permasalahan-permasalahan dan rekomendasi yang diungkapkan dalam LHP tersebut hendaknya menjadi momentum bagi pemerintah baik pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memperbaiki kinerja pengelolaan program dan kegiatan. Bagi para pemangku kepentingan, agar dapat memanfaatkan LHP BPK sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu, Hery Ridwan juga mengingatkan agar pemerintah Provinsi dan Kabupaten dapat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.



Lebih lanjut, Hery Ridwan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan program dan kegiatan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang telah bersinergi dengan BPK RI dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Serta berharap agar hubungan dan sinergitas yang baik tersebut dapat tetap terjaga sehingga dapat mewujudkan Provinsi Sulawesi Barat yang maju, makmur, dan malaqbi.

Pada kesempatannya, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Siti Suraedah Suardi menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang telah menjalankan amanat undang-undang dalam mendorong pemerintahan di daerah semakin transparan, akuntabel dan terarah dalam proses pembangunan. Di tempat terpisah, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menghimbau kepada Bupati dan OPD terkait dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat untuk segera melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) dan (2) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.





SEMARAK PEMBUKAAN..... lanjut hal.1

Hadir secara fisik, Ketua BPK Agung Firman Sampurna beserta istri, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono beserta istri, Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I Hendra Susanto beserta Istri, Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara III Achsanul Qosasi beserta Istri, Anggota IV BPK/ Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara IV Isma Yatun beserta Suami, Anggota V BPK/ Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V Bahrullah Akbar beserta Istri, Anggota VII BPK/ Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing beserta Istri, Istri Anggota VI BPK/ Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VI Amanah Abdulkadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama termasuk Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Hery Ridwan beserta jajarannya dan para Pegawai Pelaksana BPK.

Dalam kegiatan HUT Ke-75 BPK ini akan diadakan perlombaan kesenian dan kreatifitas yang meliputi lomba fotografi, podcast audio dan video, penulisan berita, vocal group, menyanyi individu, dan ketoprak humor. Selain itu, juga akan diselenggarakan pertandingan olah raga dan keterampilan yang meliputi lomba sepeda, catur, bulu tangkis, senam, juggling bola, panahan dan e-Sport yang sebagian besar akan dilaksanakan secara virtual. Sebagai puncak rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-75, BPK menyelenggarakan upacara bendera, syukuran, dan Family Gathering pada bulan Januari 2022 guna mempererat jalinan kekeluargaan pada keluarga besar BPK dari pimpinan hingga pelaksana BPK.

Diakhir acara, dilaksanakan kegiatan eksebisi pertandingan Tenis Meja antara BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Perwakilan, Hery Ridwan dan Kepala Sekretariat Perwakilan, Aminullah vs Balai Diklat PKN Gowa yang diwakili oleh Kepala Balai, Moch. Iwan Rivdijanto dan Kasubag TU, Surya Kusuma Wisnuwardhana yang diselenggarakan di Loby Kantor Balai Diklat PKN Gowa



TINJAU PROSES REHABILITASI..... lanjut hal.1

Hery Ridwan bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengunjungi Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju untuk memastikan proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat berjalan baik dan lancar.

Gempa Bumi yang menguncang Kabupaten Majene dan Mamuju pada 15 Januari 2021 silam mengakibatkan kerusakan Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat sehingga kegiatan operasional dan administrasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dialihkan sementara ke Kantor Balai Diklat PKN Gowa BPK RI di kabupaten Gowa. Pasca gempa bumi tersebut, telah dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi atas gedung Kantor BPK oleh Kementerian PUPR serta instansi terkait lainnya. Dalam kesempatannya, Dirjen Cipta Karya PUPR menyampaikan agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan harus memenuhi standar yang berlaku dan tetap menjaga kualitas untuk memberikan rasa aman kepada penghuni bangunan serta berharap agar pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga gedung bangunan dapat segera dimanfaatkan.



PENYERAHAN LHP PILKADA SERENTAK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA..... *lanjut hal.1*

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP-DTT) atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat serta LHP-DTT atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa secara virtual pada Kamis, 23 Desember 2021.



Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI, Hery Ridwan menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan atas pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada KPU dan BAWASLU Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah .



BPK RI berharap agar permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam LHP tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan perbaikan bagi KPU Provinsi dan Kabupaten, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah maupun dalam pengelolaan program dan kegiatan selanjutnya. Bagi para pemangku kepentingan, Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Rustang menyampaikan terima kasih atas LHP yang telah disampaikan terkait pemeriksaan pelaksanaan Pilkada serentak, semoga apa yang menjadi rekomendasi BPK RI dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Pada kesempatan yang lain, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Sulfan Sulo mengapresiasi kinerja dan kerja sama yang selama ini dilakukan oleh BPK Perwakilan Sulawesi Barat serta menjadikan hasil rekomendasi BPK RI sebagai momentum untuk melakukan perbaikan.

Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CASN BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ... *lanjut hal.1*

Makassar, (30/11) – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Biro SDM BPK RI dan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar. SKB merupakan kelanjutan dari tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dimaksudkan untuk menguji kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki dengan formasi yang dipilih. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari hari Selasa, 30 November 2021 hingga Rabu, 1 Desember 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dari penean perlengkapan kesehatan berupa masker, cek suhu tubuh, verifikasi hasil tes swab antigen, hingga penyemprotan disinfektan berkala di ruang ujian. Tes SKB ini dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI Hery Ridwan.



Dalam sambutannya Hery menyampaikan harapannya agar para CASN nantinya bisa bekerja dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK dalam mengawal harta negara. "Dengan adanya kalian nanti diharapkan agar kalian bisa mengawal harta negara dengan akuntabel agar tujuan pembangunan dapat tercapai sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang tentunya dengan tetap memegang nilai-nilai Integritas, Independensi, dan profesionalisme," pesan Hery Ridwan.



PEMBAHASAN TINDAK LANJUT.... lanjut hal.1

Gowa, (13/12), Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah. Dalam rangka menjalankan amanah tersebut BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) sampai dengan Semester II Tahun 2021 di Aula Serbaguna Balai Diklat PKN Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 s/d 15 desember 2021

Kegiatan yang diikuti Inspektorat Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Barat tersebut dimaksudkan untuk memutakhirkan posisi hasil tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pejabat berdasarkan amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan"

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat BPK RI Hery Ridwan didampingi Kepala Subauditorat Nursiska Ria menyampaikan nilai rata-rata atas capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per 30 November 2021 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat sebesar 75,45% .Persentase tersebut telah melampaui target Nasional yaitu 75%.

Lebih Lanjut Hery Ridwan berharap agar Inspektorat berperan aktif dalam mendorong OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SiPTL secara berkala, maupun melakukan koordinasi dan komunikasi terkait kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga dapat meningkatkan presentasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat meningkat diatas 80%.

Sebagai wakil dari Entitas Pemeriksaan se Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat M. Natsir menyampaikan bahwa melalui forum PTLRHP BPK RI Semester II Tahun 2021 sebagai momentum untuk saling bahu-membahu antara provinsi dan kabupaten agar dapat segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi barat.

"marilah kita secara bersama-sama antara provinsi dan kabupaten untuk dapat segera menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan melampirkan dokumen yang faktual, riil dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga Rekomendasi dari BPK dapat selesai dan Ditindaklanjuti".

BPK SULBAR JALIN KOMUNIKASI AKTIF.... lanjut hal.1

Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan menjaga hubungan baik antara Institusi Penegak Hukum dan Instansi Vertikal dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Barat, Hery Ridwan melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat pada Senin, 1 November 2021. Dalam kunjungannya, Hery Ridwan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Didik Istiyanta. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan dan Kepala Kejaksaan Tinggi membahas terkait Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), Pemeriksaan Investigatif, Permintaan Keterangan Ahli, dan prosedur permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Selain itu, dalam rangka menjaga dan meningkatkan sinergi dengan Instansi Vertikal dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Hery Ridwan juga melakukan komunikasi aktif dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Hermanto pada Selasa, 2 November 2021. Pada kesempatan tersebut, Hermanto menyempatkan diri berkunjung langsung ke Kantor Darurat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Karema, Mamuju, Sulawesi Barat (Rumah Jabatan BPK Provinsi Sulawesi Barat).

Dalam pertemuannya dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Hery Ridwan menyampaikan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia dengan BPK dalam pelaksanaan tugas masing - masing institusi. Di mana salah satu program kerja dari Bank Indonesia ialah elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang berfungsi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan penerapan elektronifikasi tersebut, BPK dapat dengan mudah melakukan kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi Pandapatan Asli Daerah yang bersumber dari pembayaran pajak maupun retribusi daerah. Selain itu, salah satu bentuk sinergi antara BPK dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam bidang pemeriksaan ialah terbentuknya Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa yaitu IPKN (Institut Pemeriksa Keuangan Negara) di mana BPK sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksaan yang dalam kepengurusan pada IPKN Wilayah menggandeng Kepala Perwakilan Bank Indonesia sebagai Dewan Konsultatif.



PENGEMBANGAN KOMUNITAS UNGGULAN (PKU) DILINGKUNGAN BPK PERWAKILAN PROV.SULBAR



Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, (11-11) – Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Barat Aminullah menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Bersama Pimpinan KPK RI di wilayah Provinsi Sulbar di Hotel Grand Mutiara Mamuju pada Kamis, 11 November 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Bupati se- Sulbar, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta tamu undangan lainnya

Rapat koordinasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua KPK RI Lili Pantauli Siregar tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi barat yang telah dimulai sejak awal 2018. Kala itu, pelaksanaan rencana aksi diikuti dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Sulawesi Barat dengan Tim Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) KPK-RI.

Melalui Kegiatan Monitoring Centre of Prevention (MCP), diimplementasikan delapan area intervensi program pencegahan korupsi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APiP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah agar kepala daerah membangun mekanisme pengawasan yang memadai dan meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Vertikal sehingga tujuan dari penanganan korupsi terintegrasi menjadi semakin lebih baik. Sehubungan dengan hal tersebut Gubernur Sulawesi Barat, Ali Ba'al Masdar menyampaikan bahwa Pemerintah

Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten se-Sulawesi Barat berkomitmen dan sepenuhnya mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh KPK RI sejak tahun 2018 melalui MCP yang difokuskan pada delapan area itu. " Ini merupakan tantangan yang harus disikapi dengan kerja lebih keras semua pihak terkait agar terus meningkatkan kerjasama pencegahan korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel " ucap Ali Baal Masdar.





Dalam rangka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama satuan kerja BPK terkait pembangunan zona integritas, BPK Perwakilan Sulawesi Barat melakukan peer assist (forum bantuan kawan dekat) dengan BPK Perwakilan Jawa Timur, Kamis (9/12/2021).

Kunjungan tersebut untuk menggali informasi tentang strategi BPK Jawa Timur dalam membangun zona integritas serta menjadi masukan berharga untuk dapat diterapkan di BPK Sulawesi Barat dengan menyesuaikan kondisi setempat.

Selain memperoleh penjelasan dari Kepala Perwakilan, para pejabat dari BPK Sulawesi Barat juga melakukan tanya jawab terkait penerapan inovasi di BPK Jawa Timur dan meninjau beberapa prasarana dan sarana pendukung inovasi dan layanan seperti digital signage, layanan khusus disabilitas (jalur khusus, tempat parkir, dan toilet), ruang lobi yang representatif, ruang Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK), ruang rapat untuk komunikasi stakeholder, ruang perpustakaan, ruang koperasi, serta kantin. Hasil kunjungan ini diharapkan dapat mewujudkan perubahan di BPK Perwakilan Sulawesi Barat menuju pembangunan zona integritas.



Hai...BPKawan !
mau tau info tentang
BPK Perwakilan Sulawesi
Barat?
Sempatkan kunjungi website
kita ya di
www.sulbar.bpk.go.id

GALERI SANDEQ



Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat Hery Ridwan saat melakukan Rapat Internal Bersama Pejabat Struktural



BPK Perwakilan Sulawesi Barat melakukan koordinasi ke BPK Perwakilan Sulawesi Selatan terkait Keterbukaan Informasi Publik



kepala Sub Auditorat BPK Provinsi Sulawesi Barat Nursiska Ria saat menyerahkan LHP dan BAST



kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat M.Natsir secara langsung di kantor sementara BPK Perwakilan Sulawesi Barat di Balai Diklat PKN Gowa



Rapat kerja pelaksana BPK dalam rangka monitoring dan evaluasi atas implementasi Renstra Tahun 2021 dan perencanaan Tahun 2022, kinerja anggaran s.d. November 2021 dan highlight anggaran TA 2022, dan kegiatan Pengawasan dengan tema "Lesson Learnt Pemeriksaan Strategis 2021 dan Pemeriksaan, Lesson Learnt, dan Rencana Pelaporan Hasil Pemeriksaan Tematik Nasional PN 1 dan PN 3 Tahun 2021 serta Optimalisasi Pengelolaan Data SIKAD melalui Sinergi Penyelesaian dan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah



Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Barat Hery Ridwan Saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis AKN V dan AKN VI Tahun 2021 di Magelang pada 14 s.d 15 Oktober 2021



Dengan Menyampaikan Penghargaan yang tinggi, Kalan BPK Hery Ridwan melepas Pegawai BPK Sulbar yang telah di pindah tugaskan



Redaksi

Pengarah : Hery Ridwan
Penanggung jawab : Aminullah
ketua : I Made Anom Jumitra
Wakil Ketua : Ardiansyah
Sekretaris : Dedi Setyawan
Tim Redaksi :
Rahmat, Husen Wahyu Adi, Dicky
Febriano, Yandi Asram

